



Pendidikan Responsif Budaya sebagai Upaya Menciptakan Pendidikan Multikultural

Bz. Fitri Pebriansyah

Universitas Negeri Yogyakarta

Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55281

Correspondence: E-mail: pbz.fitri@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik diskriminasi yang terjadi di Indonesia terutama di bidang pendidikan. Hal itu dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2014-2015 tercatat ada 175 berkas pengaduan pelanggaran HAM terhadap hak atas pendidikan, bahkan beberapa waktu lalu kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan di Indonesia masih terjadi. Pelanggaran tersebut meliputi deskriminasi ras, penjatuhan sanksi yang sewenang-wenang, perlakuan deskriminasi terhadap korban pemerkosaan, tindak kekerasan di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Melalui pendekatan etnopedagogi yang melihat pengetahuan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan, diharapkan dapat mengurangi bentuk diskriminasi yang terjadi di sekolah. Untuk itu, sangat penting bagi guru memiliki kepekaan terhadap keragaman budaya siswa mereka agar menjadi kelas yang efektif.

ARTIKEL INFO

Kata Kunci:
Diskriminasi,
Pendidikan,
Etnopedagogik

1. PENDAHULUAN

Diskriminasi Ras dan etnis telah menjadi sebuah fenomena yang berlarut-larut dan terus ditolerir di Indonesia. Misalnya dengan mengetik kata “aseng” pada mesin pencarian Google, Facebook dan Twitter maka dengan mudah ditemukan umpatan, makian dan lelucon berbau rasial terhadap etnis tionghoa. Begitu pula terjadi pada penduduk papua dengan istilah yang bermacam-macam yang mengandung berkonotasi negatif

Berdasarkan survei Komnas HAM yang berjudul “Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi” menunjukkan hasil bahwa 81,9% responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama. 82,7% persen responden dalam survey mengatakan bahwa mereka lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama. Sementara 83,1% mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama. Berdasarkan hasil survey tersebut, peneliti Komnas HAM mengatakan bahwa potensi akan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis memiliki probabilitas yang cukup besar, atau setidaknya hal ini mengidentifikasi sikap permisif sebagian masyarakat atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di masyarakat (Baskara, 2018). Oleh karena itu tidak jarang pula tindak pelanggaran HAM dan deskriminasi masih terjadi dalam dunia pendidikan.

Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron menyatakan bahwa jumlah pelanggaran HAM dan deskriminasi dalam dunia pendidikan masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan, hal ini dibuktikan dalam kurun waktu dua tahun dari 2014-2015 tercatat ada 175 berkas pengaduan pelanggaran HAM terhadap hak atas pendidikan. Pelanggaran tersebut meliputi

deskriminasi ras, penjatuhan sanksi yang sewenang-wenang, perlakuan deskriminasi terhadap korban pemerkosaan, tindak kekerasan di lingkungan sekolah dan lain sebagainya (Komnasham, 2017). Maka hal ini menandakan bahwa dunia pendidikan belum dapat lepas dari tindakan diskriminatif oleh penyelenggara sekolah. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut Gloria Ladson-Billing dalam bukunya Fatima Pirbhai-illich dkk (2017) mendirikan CRP (Culturally Responsive Pedagogy) atau pendidikan responsif budaya untuk mengatasi cara-cara atau tindakan diskriminatif dalam dunia pendidikan guna mencapai pendidikan multikultural.

Pendidikan responsif budaya adalah model pendidikan teoritis dan praktik yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu siswa menerima dan memperkuat identitas budayanya. Menurut Ladson-Billing (1995: 164) terdapat tiga proposisi pendidikan tanggap budaya, yakni: pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademis; kedua, peserta didik mampu mengembangkan, dan memiliki kompetensi budaya (cultural competence); dan peserta didik membangun kesadaran kritis (critical consciousness) sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Sehingga pendidikan responsive budaya juga merupakan pembelajaran konstruktivistik (Alexon 2010:14).

2. PELANGGARAN HAM DAN DISKRIMINASI DUNIA PENDIDIKAN: URGENSI PENDIDIKAN RESPONSIF BUDAYA

Berdasarkan survei Komnas HAM tahun 2018 yang berjudul “Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi” menunjukkan hasil bahwa 42% melihat orang atau kelompok melakukan penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, sampai perampasan kemerdekaan ras dan etnis

di fasilitas umum milik pemerintah seperti gedung pemerintahan, puskesmas serta yang paling miris adalah sekolah negeri. Hal ini sangatlah disayangkan sebab sekolah sebagai wilayah pembelajaran dan kebebasan berpikir menjadi tempat terjadinya sebuah diskriminasi.

Temuan lain diskriminasi dan pelanggaran HAM dalam dunia pendidikan juga dikemukakan oleh komisioner subkomisi pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, menyatakan bahwa jumlah pelanggaran HAM dan deskriminasi dalam dunia pendidikan masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan, hal ini dibuktikan dalam kurun waktu dua tahun dari 2014-2015 tercatat ada 175 berkas pengaduan pelanggaran HAM terhadap hak atas pendidikan. Pelanggaran tersebut meliputi deskriminasi ras, penjatuhan sanksi yang sewenang-wenang, perlakuan deskriminasi terhadap korban pemerkosaan, tindak kekerasan di lingkungan sekolah dan lain sebagainya (Komnasham, 2017).

Berikutnya, pada tahun 2018, berdasarkan data Komnas HAM terjadi peningkatan kasus pelanggaran HAM di dunia Pendidikan dimana jumlah kasus per april 2018 adalah 11 kasus. Padahal rata-rata jumlah kasus setiap tahun adalah 9 kasus. Serta data PBB untuk anak (Unicef) menyebutkan, satu dari empat anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan serta hasil riset International Rresearch on Women (ICRW) pada maret 2015 menyatakan bahwa 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah (Siddiq, 2018).

Sementara pada tahun sekarang ini, masih terdapat isu-isu rasial dalam dunia pendidikan. Misalnya penangkapan Ferry Kombo mantan ketua BEM Universitas Cendrawasih karena meminta dukungan dan solidaritas kepada masyarakat terhadap kasus rasisme papua dituntut 10 tahun penjara dengan pasal makar (Andita, 2020).

Sehingga berdasarkan rentetan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Indonesia belum terdapat kemajuan yang signifikan

dalam mengatasi pelanggaran HAM dan diskriminasi. Oleh karena itu pendidikan responsif budaya dapat dijadikan solusi demi tercapainya pendidikan multikultural. Dalam teori dan

praktiknya guru bukan hanya memberikan pembelajaran namun juga menuntut responsive terhadap keberagaman budaya, etnis, dan budaya. Hal ini juga berdampak pada pembelajaran yang diterima peserta didik tidak berjarak pada realitas kehidupan sosial budaya Indonesia yang beragam.

Ketika membahas mengenai karakteristik guru responsif budaya, terdapat enam karakteristik yang harus dimiliki, yakni: mempunyai kesadaran sosio- kultural; mempunyai afirmasi terhadap keragaman latarbelakang peserta didik; mempunyai kepercayaan diri dalam mengemban tugas; memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dan mendorong peserta didik mengembangkan konstruksi pengetahuannya sendiri; mengetahui pola hidup peserta didik, dan mampu menggunakan informasi mengenai pola hidup peserta didik untuk mendesain pembelajaran yang bermakna (Villegas dan Lucas, 2002: 22).

Dengan demikian, pendidikan guru tanggap budaya tidak hanya bertujuan membekali guru untuk menyadari, menghormati dan mengakui kenyataan bahwa terdapat keragaman budaya atau nilai yang berbeda yang terdapat pada peserta didik yang berasal dari latar belakang suku, agama, bahasa dan etnis yang berbeda, tetapi lebih dari itu mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sisi- sisi khusus atau keunikan dari budaya peserta didik dan menggunakannya sebagai titik berangkat dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran (Gay, 2002: 107).

3. STRATEGI MANAJEMEN KELAS YANG RESPONSIF BUDAYA

Indonesia merupakan salah satu negara 771actor771ive771al di dunia, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sosio-kultur maupun geografis yang begitu beragam (Ainul Yakin, 2005:4). Lebih khusus lagi, hal

itu dapat dilihat dari cara pandang, tindakan, wawasan setiap individu yang ada terhadap berbagai macam fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya yang memiliki pandangan yang beragam (Hanum, 2006: 1). Setiap siswa berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka memiliki nilai, norma, dan perilaku yang berbeda. Secara tradisional, para guru umumnya bertindak seolah-olah setiap orang memiliki harapan budaya yang sama dan guru cenderung mengabaikan perbedaan budaya. Sebagaimana yang terjadi di era orde baru yang terdapat beberapa buku yang memuat contoh stereotip budaya tertentu, dimana karena ditakutkan mengandung unsur SARA, banyak buku pelajaran yang tidak berani menampilkan contoh 772actor atau gambar yang berasal dari agama lain dengan maksud agar tidak terjadi ketegangan. Namun, kini harus dijelaskan secara menyeluruh pada siswa agar dapat membantu siswa mengenal, memahami, dan menghargai perbedaan, sehingga tidak perlu lagi takut untuk mencantumkan contoh dari agama, etnis, dan budaya lain (Hanum, 2006: 11).

Guru dan orangtua harus menjadi role model bagi siswa di sekolah yang berkaitan dengan stereotype dan prasangka. Salah satu yang mempengaruhi prasangka adalah opini yang telah terbentuk atau identitas yang telah diberikan oleh masyarakat tertentu. Tidak jarang kita mendengar seseorang memberikan stereotype atau cap pada etnis tertentu, misalnya bahwa orang Sumatera dan orang dari Indonesia bagian Timur itu memiliki sifat atau watak yang cenderung keras dan kasar, atau bahwa orang Cina, Minang, dan Sunda itu memiliki sifat materialistis. Hal seperti ini perlu disadari dan dihindari oleh guru agar interaksi dengan siswa berlangsung dengan baik sehingga pengelolaan kelas berjalan kondusif dan 772actor772ive (Gani, 2018:326-327).

Adanya perbedaan budaya merupakan salah satu hal yang harus dipelajari oleh guru dan harus mampu mengelolanya untuk mempromosikan lingkungan belajar yang efektif di kelas mereka (Franklin, 2005). Lebih lanjut, Hardin (2004) juga menjelaskan bahwa sangat penting guru memiliki kepekaan terhadap keragaman budaya siswa mereka. Selain itu, (Weinstein dalam Gani, 2018:329) mengungkapkan bahwa untuk dapat berinteraksi lintas budaya, guru harus memiliki pengetahuan mengenai latar belakang budaya siswa yang diajarnya. Guru perlu memahami warisan budaya dari kelompok etnis yang berbeda, bagaimana mereka memberikan sanksi terhadap perilaku dan merayakan pencapaian, aturan mereka tentang sopan santun, penghormatan, dan etiket. Guru juga perlu memahami orientasi nilai, standar untuk pencapaian, tabu sosial, pola relasional, gaya komunikasi, sistem motivasi, dan gaya belajar kelompok etnis yang berbeda. Ini kemudian harus digunakan dalam mengelola perilaku siswa, serta mengajar mereka secara tepat di kelas dan sekolah. Untuk itu, agar menjadi Manager kelas yang efektif, guru harus menyadari masalah budaya dan sosial yang mempengaruhi perilaku siswa. Tingkat sosial ekonomi, agama, struktur keluarga, latar belakang rumah, budaya, ras, dan gender mempengaruhi perilaku siswa. Jika guru tidak memahami 772actor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku siswa, mereka mungkin menggunakan teknik yang tidak tepat untuk menghentikan kesalahan perilaku, menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap siswa, salah menafsirkan perilaku siswa, dan, seringkali, menciptakan situasi yang membuat siswa lebih jauh dari lingkungan kelas (Levin & Nolan, 1996; Weinstein et al., 2004). Disamping itu, guru harus mengatur dan mengorganisir yang meliputi isi, proses, situasi dan kegiatan di sekolah yang menekankan diversity dalam pembelajaran di sekolah agar siswa yang berasal dari berbagai suku, gender, ras, agama dan lain sebagainya memiliki kesempatan untuk

dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat saling menghargai perbedaan itu (Hanum, 2006:12).

5. SIMPULAN

Untuk mengembangkan pembelajaran yang bermutu dan bermartabat kiranya cukup bijak jika mengangkat kembali pemikiran tokoh pendidikan nasional. Teori Trikon dari Ki Hadjar Dewantara sangat relevan untuk menguatkan pendidikan nasional dan juga memajukan kebudayaan nasional sebagai solusi terhadap masalah yang terjadi maupun tantangan yang dihadapi. Teori Trikon menekankan pendidikan sebagai tempat pembudayaan nilai dan karakter.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah menanamkan karakter dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran. Dimasukkannya nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran akan memperbesar nilai tambah dan memajukan kearifan lokal. Kearifan lokal yang dipadukan dengan situasi pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, yang kemudian diharapkan dapat mampu mengangkat mutu pembelajaran.

Namun, hambatan yang mampu mempengaruhi proses pengimplementasian nilai-nilai kearifan lokal disekolah ialah pola pikir yang dimiliki oleh peserta didik tentang kebiasaan lama yang sudah hilang seperti

gotong royong, musyawah, dan lain sebagainya yang mana saat ini tergantikan dengan kebiasaan baru yang bertolak belakang dimana saat ini peserta didik lebih acuh tak acuh pada lingkungan dan juga lebih bersifat individualistis dalam melakukan segala sesuatu. Selanjutnya motivasi belajar siswa yang bersifat fluktuatif juga menjadi salah satu hambatan dalam pengimplementasian kearifan lokal dalam pembelajaran sosiologi, sehingga perlunya

kondisi yang dapat membangun suasana belajar yang menarik. Ada pula kondisi pertemanan yang ada di kelas yang akan membentuk peserta didik membentuk kubu-kubu baru dalam kelas dan memprioritaskan kubunya sendiri, sehingga guru harus peka akan hal tersebut dan membagi kelompok belajar dari berbagai golongan dan ras. Hal lain yang juga menghambat proses pembelajaran ialah pendidik yang dibebankan oleh materi yang sangat padat dan kurangnya waktu dalam satu kali pembelajaran sehingga pendidik kesulitan untuk dapat menyampaikan pembelajaran yang disertai dengan nilai-nilai kearifan lokal secara komprehensif.

Selain itu, Menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam era sekarang ini adalah pilihan yang terbaik, kearifan lokal memiliki keunggulan dalam menjaga serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat lokal itu sendiri agar tidak mengabaikan sisi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat tradisional. Untuk itu perlu dan terus di jaga serta dimanifestasikan sebagai sebuah kekuatan dalam menghadapi tantangan perubahan dunia. Adapun upaya revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pihak Sekolah

- Guru mengamalkan nilai-nilai pandangan hidup dari makna yang terkandung pada nilai kearifan lokal budaya setempat dalam setiap pembelajaran di kelas;
- Upaya membelajarkan nilai-nilai kearifan lokal tidak hanya dilakukan oleh guru sosiologi, melainkan dilakukan secara terintegrasi oleh sistem kurikulum sekolah;
- Pihak sekolah bisa mengadakan program khusus pada pengenalan nilai-nilai budaya tertentu sebagai warisan kearifan lokal;

b. Pihak Pemerintah

- Pemerintah daerah bisa saja membuat dan memberlakukan peraturan daerah terkait pembelajaran beraspek kearifan lokal seperti halnya pembelajaran berwawasan multikultural yang berjalan dengan baik di Indonesia.
- Sama halnya dengan pihak sekolah, pemerintah bisa mengadakan kegiatan tahunan untuk mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal agar tetap ada.

c. Masyarakat

- Upaya yang sangat bisa dilakukan masyarakat dalam merevitalisasi kearifan lokal ialah dengan mendukung keputusan pemerintah dan melakukan apa yang diputuskan.
- Masyarakat juga bisa memulai kembali untuk menerapkan hal-hal kecil di lingkungan keluarga terkait nilai-nilai kearifan lokal.

Disamping itu, lembaga pendidikan merupakan salah satu wadah

pengimplementasian yang tepat dalam menjaga kearifan lokal ditengah gempuran perubahan sosial budaya yang terjadi melalui etnopedagogi di sekolah. Selain itu, Alwasilah (2008) memandang bahwa etnopedagogi sebuah pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pendidikan melalui pendekatan etnopedagogi, melihat pengetahuan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan (Surya, 2011).

Dalam mata pelajaran sosiologi SMA, Terdapat berbagai materi dengan kompetensi dasar yang bisa dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Masing- masing kompetensi dasar dapat dilakukan pendekatan strategi pembelajaran yang berbeda dalam mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal, semua bergantung pada guru mata pelajaran khususnya pendidikan sosiologi untuk mampu terus mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar setiap materi dapat sesuai dengan keberagaman yang ada diantara peserta didik agar semua peserta didik dapat turut serta terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah tanpa adanya pembeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Yakin, M. 2005. Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta. Pilar Media.
- Alexon, Alexon .2010. Pembelajaran Terpadu Berbasis Budaya. FKIP UNIB Bengkulu: Bengkulu Press
- Alwasilah, A.C. (2008). Tujuh Ayat Etnopedagogi. Artikel dalam Pikiran Rakyat Bandung, 23 Januari 2008
- Andita, Rahma. 2020. Didakwa Makar, Eks Ketua BEM Uncen Dituntut 10 Tahun Penjara. Diakses pada 12 juni 2020 di laman <https://nasional.tempo.co/read/1350445/didakwa->

makar-eks-ketua-bem-uncen-dituntut-10-tahun-penjara

- Baskara L, Ing Adhi.2018. Survei Komnas HAM: Diskriminasi Ras dan Etnis Masih Terus Ditolerir. Diakses pada 12 juni 2020 di laman <https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP>
- Franklin, J. Managing the Multicultural Classroom: Effective Learning Communities Are Built on Understanding. diakses pada 11 juni. 2020 di laman <http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/may05/vol47/num05/Managing-the-MulticulturalClassroom.aspx>,
- Gani, Suriati Abdul. 2018. Pendidikan yang Responsif Secara Budaya. Surabaya. UPH Press
- Gay, Geneva. 2002. Preparing Teacher for Culturally Responsive Teaching dalam Journal of Teacher Education, Vol. 53, No. 2, hal. 106-116.
- Hanum, Farida. 2006. Pentingnya Pendidikan Multikultural dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. Disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema”Pendidikan Multikultural dan Demokrasi di Indonesia” dan Wisuda Program Akta IV Angkatan I, STIT Alma Ata Yogyakarta
- Hardin, C.J. (2004). Effective Classroom Management: Models and Strategies for Today’s Classrooms. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
- Illich, Fatima, Pete, Martin. 2017. CULTURTALY RESPONSIVE PEDAGOGY :Working Toward Decolonization, Indigeneity and Interculturalism . Palgrave Macmillan
- Kementrian Pendididkan dan Kebudayaan. 2011. Model Pendidikan Guru Berbasis Kebhinekaan Budaya di Indonesia. Volume 17 (4). Diunduh dari Jurnaldikbud.kemendikbud.go.id.
- Komnas HAM. 2018. Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi. Diunduh dari www.komnasham.go.id.
- Siddiq,Taufik. 2018. Komnas HAM Menilai Pelanggaran HAM di Dunia Pendidikan Meningkat. Diakses dari Tempo.co
- Surya, Priadi. (2011). Kepemimpinan Etnopedagogi Di Sekolah. Majalah Ilmiah Dinamika UNY, Mei, hlm. 1-12 .
- Weinstein, Carol S., Tomlinson-Clarke, S., Curran, M. Toward a Conception of Culturally, Education, and Human Development. Journal of Teacher Education, Vol. 55, No. 1, January/February 2004 25-38. Diakses 15 Maret 2018 dari: <http://jte.sagepub.com/cgi/content/abstract/55/1/25>